KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT	Nomor SOP	W21.OT.02.02 -2061
	Tanggal Pembuatan	4 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	4 SEPTEMBER 2025
	Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH I GUSTI PUTU MILAWATI NIP. 197705092001122001
	Nama SOP	SOP ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);	2. Memahami tugas dan fungsi bagian pemantauan,analisis dan pelaporan
3	Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);	
4.	Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932); dan	
5	Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	

Keterkaitan :	Perlatan / perlengkapan:
-	1. Komputer / Printer / Scanner
	2. Jaringan Internet
	3. Jaringan Telekomunikasi

Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
SOP Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah jika tidak dilaksanakan maka kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika sustu saat diperlukan kembali

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		BPHN	Kakanwil	Ketua (Kepala Divisi)	Sekretaris Pokja	Anggota		Persyaratan	Waktu	Output	
	Tahapan Persiapan (B02-B03)	MULAI									
1	Penentuan tema dengan mengacu pada huruf A angka 1							Disposisi	1 Hari	Nota Disposisi	
2	Penelusuran dan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait tema							Peraturan Perundang-undangan terkait	5 hari	Draft Proposal/TOR	
3	Penyusunan proposal atau Term of Reference (ToR) kegiatan analisis dan evaluasi Perda							Draft Proposal/TOR: latar belakang, maksud tujuan, metode, tema, jadwal kegiatan, Keluaran/Output	5 hari	Persetujuan Proposal/TOR	
4	Pembentukan tim atau kelompok kerja analisis dan evaluasi			Y				SDM terdiri dari : Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota (Analis Hukum dan Perancang)	5 Hari	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	
	Tahap Pelaksanaan Analisis dan Perda (B04-B09)		Y								
1	Analisis dan evaluasi Perda dengan menggunakan metode 6 (enam) dimensi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan							Persetujuan/Koreksi Draft Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	14 hari	Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	
2	Rapat internal Tim/Kelompok Kerja							Persetujuan/Koreksi Draft Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	14 hari	Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	
3	Rapat dengan Narasumber							Persetujuan/Koreksi Draft Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	14 hari	Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	
4	Focus Group Discussion (FGD)							Persetujuan/Koreksi Draft Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	14 hari	Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	
	Tahap Tindak Lanjut (B09-B12)			Y							
1	Penyusunan Laporan Akhir (Rekomendasi)		Y					Persetujuan/Koreksi Draft Laporan Akhir	21 hari	Laporan Akhir	
2	Memberikan Laporan Akhir kepada Pihak Terkait		SELESAI					Surat Pengantar kepada pihak terkait	5 hari	Surat Pengantar Penyampaian Laporan Akhir	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di Wilayah
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	Kantor Wilayah (Kanwil)
	Produk	:	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H)
	Scope/ruang lingkup	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	:	Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di Wilayah
Langkah Awal	:	Kepala Kantor Wilayah menerima tema analisis dan evaluasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional
Langkah Utama	:	Analisis dan evaluasi peraturan daerah
Langkah Akhir	:	Pemberian rekomendasi analisis dan evaluasi peraturan daerah kepada pihak terkait

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	:	1. Kepala Kantor Wilayah menerima tema analisis dan evaluasi dari BPHN
Langkah Utama	:	2. Kepala Kantor Wilayah memberikan disposisi kepada Kepala Divisi P3H untuk melakukan penelusuran dan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait tema
		3. Kepala Divisi P3H menyusun proposal atau *Term of Reference* (ToR) kegiatan analisis dan evaluasi Perda
		4. Kepala Divisi P3H membentuk tim atau kelompok kerja analisis dan evaluasi peraturan daerah
		5. Kepala Divisi P3H melaksanakan rapat internal Tim/Kelompok Kerja
		6. Tim/Kelompok Kerja melakukan analisis dan evaluasi Perda dengan menggunakan metode 6 (enam) dimensi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
		7. Tim/Kelompok Kerja melakukan rapat dengan Narasumber
		8. Tim/Kelompok Kerja melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)
Langkah Akhir	:	9. Kepala Kantor Wilayah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait